

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2005

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindopersada, Jakarta, 2008

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang saham*, PT. Visimedia Pustaka, Jakarta, 2016

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Fredrik Hagmann, *Beneficial Ownership – A Concept in Indetity Crisis*, Lund University, 2017

Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Perseroan Terbatas. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

G.H.S Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980

I.G Rai Widjaja, *Hukum Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2000

Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka, Jakarta, 2003

John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta: 1996

Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, PT. Genta Publishing, Yogyakarta, 2014

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Jakarta, 1994.

L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramaita, Jakarta, 2004

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet.XIX LP3ES, Jakarta, 2008.

Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998

R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta, 2003.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

\_\_\_\_\_ *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003

\_\_\_\_\_ *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2020

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

Sentosa Sembiring, *hukum dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta : Perseroan Terbatas Rineka Cipta, cet. 5, 2007

Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

### **Jurnal:**

Ahmad Yani, Mas. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia*, 1(1).

Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Endah Pertiwi, “*Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak*”, *Jurnal IUS*, Volume VI, Nomor 2, Agustus 2018

Josef M Monteiro, “*Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Pro justisia*, Volume 25, Nomor 2, April 2017

Kurniawan, Iwan. (2013). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian yang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2)

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997

Yani, Ahmad, Mas. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia*, 1(1).

### **Tesis**

Khairul Iqbal Marpaung, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Dokumen Oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan*

*Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 385 K/PID/2006*), Tesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018

Leonard Pandapotan Sinaga, *Prinsip Keterbukaan Beneficial Ownership (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, Tesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019

#### **Internet :**

Elson, <https://elson.co.id/3-organ-penting-perseroan-terbatas/>, (diakses pada tanggal 2 Desember 2023).

Financial Action Task Force (FATF), “*How much money is laundered per year?*” <http://www.fatfga.fi.org/faq/moneylaundering/> (diakses pada 20 Desember 2023, pukul 20.30)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59828c86b30d3/ppatk-yakinkan-notaris-wajib-apor-tak-langgar-rahasia-jabatan/>, (diakses tanggal 20 Januari 2024, pukul 23.00)

Maryati Abdullah, Menguak Benefial Ownership, Membongkar Kamufilase Ekonomi, <https://pwpindonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufilas-ekonomi> diakses pada tanggal 2 Juni 2024.

Muhammad Wildan, “*Proses Identifikasi Terkendala, Pelaporan Informasi BO Masih Rendah, Muhammad Wildan*”, <https://news.ddtc.co.id/proses-identifikasi-terkendala-pelaporan-informasi-bo-masih-rendah-21310> (diakses pada 20 Desember 2023, pukul 21.00)

Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 71 [https://elibrary.uika-bogor.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=21549](https://elibrary.uika-bogor.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21549), (diakses pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 20.00)

PPATK. (2021). *Focus Group Discussion Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Melalui Sistem Aplikasi Pelaporan GoAML*. <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20211014131422.pdf> (diakses pada tanggal 2 Juni 2024, pukul 17.31)

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

